

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Budiarmo. (2005). *Materi Pokok Pengelolaan Keuangan Negara*. Bahan Diklat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat II. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
- Atep Adya Barata & Bambang Trihartanto. (2004). *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Bagian Humas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat. (2005). *Komisi DPR RI 2004-2009*. Diakses dari situs <http://www.dpr.go.id/humas/PasKom.htm> pada tanggal 5 Agustus 2005
- Baldric Siregar & Bonni Siregar. (2001). *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*. Edisi 3. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Binsar H. Simanjuntak. (2005). Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 1, No. 1, Mei 2005
- Engstrom, J.H. & Copley, P.A. (2002). *Essentials of Accounting for Governmental and Not-For-Profit Organizations*. New York: McGraw-Hill/Irwin
- Freeman, R.J. & Shoulders, C.D. (2003). *Governmental and Nonprofit Accounting: Theory and Practice*. Seventh Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education
- Hekinus Manao. (2004). Public Expenditure Management (PEM): Current Issues in Public Financial Management. *Prosiding Lokakarya Rintisan Penyusunan Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan/Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 21 Desember
- Hekinus Manao. (2004). *Penyusunan Laporan Keuangan*. Presentasi pada Lokakarya Menyongsong PP SAP: Strategi dan Implikasi terhadap Penyusunan Laporan Keuangan. Jakarta, 20 Desember. Diakses dari situs <http://www.ksap.org/detilberita8.htm> pada tanggal 7 Agustus 2005
- Hendriksen, E.S. & van Breda, M.F. (1992). *Accounting Theory*. Fifth Edition. Burr Ridge/Boston/Sydney: Richard D. Irwin
- Ihyaul Ulum MD. (2004). *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Malang: UMM Press
- Kerry Soetjipto. (1994). *API: Akuntansi Pemerintah*. Modul kuliah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (tidak diterbitkan)
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). (2005). *Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan*

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). (2005). Pernyataan Nomor 1 s/ 11
- M. Suparmoko. (2000). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Edisi 5. Yogyakarta: BPFE
- Muhammad Gade. (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 2002. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Mulia P. Nasution. (2004). Reformasi Manajemen Keuangan Negara. Dalam Heru Subiyantoro & Singgih Riphath. *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Rahmadi Murwanto. (2005). *Materi Pokok Pengelolaan Keuangan Negara*. Bahan Diklat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat V. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
- Revrisond Baswir. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE
- Sampurna Budi Utama. (2005). *Materi Pokok Pengelolaan Keuangan Negara*. Bahan Diklat Ujian Dinas Tingkat I. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
- Sony Loho. (2004). Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat: Upaya, Progres dan Permasalahan. *Prosiding Lokakarya Rintisan Penyusunan Buku Teks Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan/Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 21 Desember
- Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen keempat)
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Kepmendagri No 29 Tahun 2002 tentang
- Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara No 01
- Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara No 02